

# ANALISIS PRAKTIK SOSIOKULTURAL DALAM PEMBERITAAN KASUS KORUPSI PADA MEDIA METRO TV DAN NET MELALUI PERSPEKTIF ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH

Nur Indah Sholikhati

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
FKIP Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta  
pos-el: indahputih225@gmail.com

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana media televisi merepresentasikan pemberitaan kasus korupsi dan mengapa media tersebut mengonstruksikan pemberitaan kasus korupsi menjadi sedemikian rupa. Media televisi tersebut adalah Metro TV dan NET. Pendekatan penelitian berupa pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan adanya tiga aspek yang melatarbelakangi terbentuknya suatu wacana berita korupsi di Metro TV dan NET. *Pertama*, aspek situasional, yaitu wacana berita dipengaruhi keadaan politik di mana pada awal tahun 2017 akan dilangsungkan pilkada DKI Jakarta dan para pemilik media menggunakan kekuasaan mereka untuk menentukan bingkai berita dan posisi dukungannya terhadap tokoh-tokoh tertentu. Selain itu, adanya pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Oktober 2016. *Kedua*, aspek institusional, yaitu adanya pertarungan wacana antara penguasa media, KPK, dan institusi yang terlibat kasus korupsi. *Ketiga*, aspek sosial, yaitu adanya konteks ekonomi, politik, dan sosial masyarakat yang berujung pada antusiasme masyarakat yang mulai mempercayai lembaga penegak hukum dalam memberantas kasus-kasus korupsi yang selama ini masih tersembunyi.

**Kata kunci:** berita korupsi, Metro TV, NET, analisis wacana kritis Norman Fairclough

## ABSTRACT

*The objectives of this study are to analyze how mass television represents the news about corruption news as well as why mass television creates the corruption news itself. the mass television were Metro TV and NET as the objects of this study. The approach was descriptive qualitative by using critical discourse analysis by Norman Fairclough. There are three steps of critical discourse analysis by Norman Fairclough, including description, interpretation, and explanation. Based on this study, there are three aspects of creating news at Metro TV and NET. The first aspect is situational aspect, news discourse is influenced by politic situation in the beginning 2017 by holding Governor selection in DKI Jakarta and the owners of mass television use their authority to support their choices of Governor. Moreover, there is agreement about Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 in 2016 about Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar by Joko Widodo at October 2016. The second aspect is institutional aspect, there is the rival among the owner of mass television, KPK, and institution of corruption. The third aspect is social aspect, including economic, politic, and social context that become enthusiasm by citizens to support the institution of corruption itself.*

**Keywords:** corruption news, Metro TV, NET, critical discourse analysis by Norman Fairclough

## PENDAHULUAN

Televisi adalah gambar yang paling kompleks pada media rupa-rupa dwimatra dinamis (*moving audiovisual media*), bahasa rupa inilah yang dianggap paling pesat perkembangannya (Tabrani, 1992). Pada dasarnya, televisi tidak hanya sekadar sarana pelepas ketegangan atau hiburan, namun acara dan informasi apapun yang ditayangkan mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat karena dapat memengaruhi kognisi khalayaknya. Realitas subjektif atau sebagaimana yang digambarkan Lippman (dalam Berger dan Thomas, 1990) dengan jargon "*the world outside and the pictures in our head*" yang dibentuk oleh media akan menjadi gambaran realitas publik tentang berbagai peristiwa sosial yang terjadi disekitarnya. Realitas inilah yang kemudian akan mendorong respons atau sikap khalayak terhadap berbagai hal tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut, berita yang menjadi salah satu program acara di televisi sering dianggap memiliki berbagai kualitas netralitas serta otoritas yang pada kenyataannya tidak dimiliki. Seperti yang diungkapkan oleh Burton (2008) bahwa nilai yang terkandung dalam berita mengungkapkan kepentingan masyarakat tertentu. Burton juga melengkapinya dengan kalimat "nilai tersebut dapat dilihat sebagai tolok ukur kepentingan ideologis". Hal ini berarti bahwa berita bukanlah gambaran atas realitas, melainkan konstruksi realitas yang mengandung ketidaknetralan yang tidak lepas dari peran subjektivitas wartawan dalam mengonstruksikan suatu wacana berita.

Pemberitaan kasus korupsi yang menyeret pejabat pemerintahan ataupun pengusaha menjadi topik yang menarik bagi sebagian media televisi untuk diletakkan sebagai *headline* pemberitaan. Mardikantoro (2014) dalam penelitian yang berjudul "Analisis Wacana Kritis pada Tajuk (Anti) Korupsi di Surat Kabar Berbahasa Indonesia" memperoleh dua temuan mengenai wacana korupsi. Pertama, dengan bingkai mengkritisi berita korupsi, Koran Tempo dalam dua tajuknya menyatakan ketidaksetujuannya terhadap berita korupsi. Kedua, dengan bingkai mendukung berita korupsi, surat kabar Kompas, Republika, Koran Tempo,

Jawa Pos, dan Suara Merdeka memiliki sikap dan pandangan setuju dan mendukung berita korupsi di surat kabar.

Media televisi yang dipilih sebagai subjek dalam penelitian ini yaitu Metro TV dan *News and Entertainment Television* (NET). Kedua media ini dianggap sebagai media yang memiliki intensitas pemberitaan kasus korupsi yang cukup tinggi. Pemilihan media televisi tersebut didasarkan atas pertimbangan keterwakilan kepemilikan media, yakni pemilik media yang terjun di dunia politik dan pemilik media yang tidak bersentuhan dengan dunia politik.

Dalam memahami wacana berita yang disajikan media televisi secara komprehensif diperlukan perspektif kritis sehingga bahasa dan praktik kebahasaan dalam wacana berita tidak lagi dipahami sebagai alat atau medium yang netral. Analisis wacana kritis melihat pemakaian bahasa lisan maupun tulis sebagai bentuk dari praktik sosial (Fairclough dan Wodak 1997:55, Titscher, *et al* 2000:147, Eriyanto 2012:7). Oleh karena itu, analisis wacana kritis Fairclough dinilai sebagai pendekatan yang paling sesuai untuk membedah praktik diskursif dalam pengonstruksian berita korupsi yang diproduksi oleh suatu media, dalam hal ini media televisi. Paradigm kritis “perubahan sosial” Fairclough digunakan untuk menganalisis wacana dengan memperhatikan hubungan antara wacana dan perubahan sosial yang mengiringinya. Fairclough (1992:26) membagi analisis wacana kritis dalam tiga tahap, yaitu deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Dengan tahapan analisis wacana kritis yang bertahap tersebut dapat digunakan untuk menganalisis dan membongkar netralitas media dalam mengonstruksikan berita korupsi yang ada di Indonesia.

## METODE

Analisis data berdasarkan analisis wacana kritis (AWK) dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif menggunakan analisis wacana kritis (AWK) Fairclough yang memandang wacana sebagai teks. Hal ini dikarenakan bahasa dalam media massa merupakan rekonstruksi dari penulis berita (wartawan). Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif

dengan perspektif analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Untuk itu melalui analisis wacana kritis, peneliti mencoba menelisik dan membedah lebih lanjut bagaimana stasiun televisi Metro TV dan NET mengonstruksi berita korupsi yang ada.

Metode pengumpulan data menurut Sudaryanto (1993) dibagi menjadi dua, yaitu metode simak dan metode cakap. Dalam penelitian ini menggunakan metode simak yang diikuti teknik simak bebas libat cakap, teknik rekam, dan teknik catat. Data penelitian ini berupa penggalan wacana berita korupsi pada Metro TV dan NET periode bulan Oktober dan November 2016. Adapun subjek dan sumber data dari penelitian ini adalah wacana berita pada Metro TV dan NET. Kemudian pengumpulan data diperoleh dari sumber data yaitu berupa data penggalan wacana berita korupsi pada Metro TV dan NET periode bulan Oktober dan November 2016, artikel-artikel tentang wacana korupsi di Indonesia, dan berita-berita korupsi di Indonesia serta dari internet ataupun buku-buku yang berkaitan.

Metode analisis data yang digunakan berupa metode analisis yang disesuaikan dengan perspektif analisis wacana kritis Fairclough. Dalam perspektif AWK Fairclough (1992:109) terdapat tiga tahap analisis, yaitu deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Tahap deskripsi yakni menguraikan isi dan analisis deskriptif dari wacana. Pada tahap ini teks dijelaskan tanpa dihubungkan dengan aspek lain, hanya menganalisis kosakata, tata bahasa, dan struktur teks. Tahap interpretasi yaitu dengan menafsirkan teks yang dihubungkan dengan praktik wacana yang dilakukan. Tahap terakhir, tahap eksplanasi yaitu bertujuan untuk mencari penjelasan atas hasil penafsiran yang diperoleh pada tahap interpretasi untuk menemukan alasan mengapa teks berita tersebut diproduksi. Ketiga tahapan tersebut digunakan untuk mengungkapkan ideologi dalam konstruksi teks berita korupsi yang ditayangkan di stasiun Metro TV dan NET.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bahasa dalam suatu konstruksi pemberitaan di media massa tidak dapat terlepas dari hegemoni bahasa. Bahasa yang semula digunakan sebagai alat

komunikasi sudah bergeser menjadi alat untuk berpolitik, budaya, dan alat untuk mendapatkan kekuasaan. Kini, bahasa dalam suatu wacana dijadikan suatu pembenaran tentang bagaimana suatu pihak mampu menguasai orang lain untuk diperdaya dan menguasai lawan-lawannya dengan menggunakan kekuatan 'bahasa'. Analisis praktik sosiokultural didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial yang ada di luar media memengaruhi wacana yang diproduksi oleh media tersebut. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Assidik, *dkk.* (2016) yang berjudul "Citra Publik Presiden Republik Indonesia pada Pemberitaan di Harian Suara Merdeka, Tabloid Tempo, dan Harian Republika: Kajian Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough". Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa konteks sosial memperhatikan aspek situasional ketika teks tersebut diproduksi. Analisis karakteristik gaya bahasa yang telah dilakukan terhadap judul berita dan gaya kepenulisan harian Suara Merdeka, diperoleh hasil penelitian terhadap ragam gaya bahasa pada judul dan isi berita. Adapun pemberitaan dalam harian Republika memiliki beberapa karakteristik yang menjadi menarik namun tetap berada dalam koridor media dakwah Islam dan menjadi media yang lebih moderat. Sementara Tempo menjadi tabloid nasional dengan bahasa yang vulgar, tendensius dan terbuka. Pemberitaan Tempo ingin mencerminkan bahwa hak kebebasan pers memang harus ditegakkan.

Pada praktik sosiokultural dalam menganalisis suatu wacana, terdapat tiga aspek yang dirumuskan Fairclough untuk menganalisis praktik sosiokultural, yaitu aspek situasional, institusional, dan sosial. Berikut uraian yang melatarbelakangi media Metro TV dan NET dalam memproduksi wacana berita korupsi yang terdiri atas tiga aspek, yaitu aspek situasional, aspek institusional, dan aspek sosial.

### **Aspek Situasional**

Konteks sosial yang melatarbelakangi pengonstruksian berita korupsi melibatkan aspek situasional ketika wacana berita tersebut dikonstruksi. Dalam konstruksi pemberitaan di media Metro TV, terlihat bahwa teks dipengaruhi keadaan politik di mana pada awal tahun 2017 akan dilangsungkan pemilihan

kepala daerah DKI Jakarta dan para pemilik media menggunakan kekuasaan mereka untuk menentukan bingkai berita dan posisi dukungannya terhadap tokoh-tokoh tertentu. Selain itu, adanya pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Oktober 2016, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. Dari situasi tersebut, muncullah beragam wacana korupsi yang intensitas pemberitaannya lebih banyak daripada bulan sebelumnya, baik itu di media Metro TV maupun NET.

Metro TV dalam sejarahnya merupakan media televisi swasta dengan bahasa pemberitaan yang vulgar dan tendensius. Hal ini terlihat sangat jelas pada saat pemilihan presiden 2014 yang memperlihatkan kecondongan media kepada salah satu calon pasangan capres dan cawapres. Media Metro TV dalam pemberitaan kasus korupsi cenderung bersifat lunak dan tidak memberikan perspektif berlebihan terkait berita tertentu. Namun di sisi lain, Metro TV tidak segan untuk memberikan evaluasi negatif pada berbagai pihak yang dianggap berlawanan dengan ideologi media dan dianggap menghambat upaya dan cita-cita pemilik media, yaitu mewujudkan Trilogi Restorasi Indonesia melalui media pers, seperti yang dituturkan sendiri oleh Surya Paloh dalam biografinya yang berjudul "Sang Ideolog". Selain itu, adanya situasi pertarungan pilkada dan pilpres 2019 juga turut andil dalam pengonstruksian pemberitaan yang ditayangkan. Hal tersebut terlihat dari bagaimana cara wartawan media mengonstruksi dan menyajikan berita mengenai suatu kasus. Sebagai contoh media Metro TV sangat jengah dengan isu korupsi terutama jika pelaku korupsi tersebut dari pihak oposisi, maka media Metro TV akan lebih gencar memberitakan kasus tersebut. Misalnya dalam kasus E-KTP, media Metro TV lebih banyak memberitakan kasus E-KTP dengan menyebutkan tersangka korupsi dengan diikuti embel-embel partainya daripada pemberitaan di NET yang tidak menyebutkan partai dari tersangka korupsi seperti pada penggalan berita berikut.

- (1) Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Mohammad Nazaruddin kembali diperiksa oleh KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek E-KTP di Kementerian Dalam Negeri. Dan untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin, terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik atau E-KTP, di Direktorat Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tahun 2011 hingga tahun 2012. (*Korupsi Proyek Pengadaan E-KTP*, Metro TV, 1 Oktober 2016)
- (2) Agus sempat memberikan surat kepada penyidik KPK untuk menjalani pemeriksaan ulang pada tanggal 1 November 2016, di mana Agus Martowardojo ini sebelumnya juga sempat disebut-sebut oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, yakni adalah Muhammad Nazaruddin. (*Korupsi Proyek E-KTP*, Metro TV, 1 November 2016)
- (3) Penyidik KPK juga telah memeriksa sejumlah pihak lain yang sebelumnya juga disebut mantan bendahara umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin, ikut terlibat korupsi proyek ini. Pihak pemenang tender di antaranya Dirut Percetakan Negara, Isnu Adhi Wijaya, dan Direktur PT Austra Grapia, Masagus, juga Gamawan Fauzi, dan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. (*Siapa Lagi Terseret Kasus Korupsi E-KTP?* Metro TV, 4 November 2016)

Dari data (1), (2), dan (3) yang memberitakan mengenai kasus korupsi E-KTP tersebut, media Metro TV selalu memunculkan partai Demokrat setiap kali menyebutkan M. Nazaruddin. Dari beberapa hal tersebut terlihat bahwa pihak Metro TV ingin menciptakan citra negatif pada partai oposisi dari pemilik media dalam memberitakan kasus korupsi yang saat ini memang sedang menjadi perhatian masyarakat luas. Dengan pemberian embel-embel partai yang mengusung salah satu dari pelaku korupsi E-KTP yang diberitakan tersebut, secara tidak langsung pihak media ingin menjatuhkan partai tersebut dalam pemilihan kepemimpinan yang akan digelar, yaitu pilkada DKI 2017 dan pilpres Indonesia 2019. Adanya situasi politik tersebut terlihat bahwa hal tersebut juga melatarbelakangi media Metro TV dalam mengonstruksikan berita yang mungkin bisa menguntungkan pihaknya dan juga partai koalisinya.

Sementara itu, di media NET cenderung mengonstruksikan berita korupsi secara tegas dan lugas, tidak melihat siapa yang menjadi tokoh atau pelaku korupsi.

- (4) Agus memenuhi panggilan penyidik KPK setelah dipanggil untuk ketiga kalinya. Dalam kasus E-KTP, kini KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Kerugian keuangan Negara dalam proyek tersebut mencapai 2 trilyun. (*Agus Martowardojo Penuhi Panggilan KPK*, NET, 1 November 2016)

Hal ini sangat terlihat jelas pada pemberitaan di NET yang tidak mengaitkan pelaku korupsi dengan partai-partai tertentu, terutama pada kasus korupsi E-KTP.

Hal ini karena pemilik NET tidak memiliki kepentingan tertentu pada partai politik tertentu. Stasiun NET yang masih baru dan sangat idealis ini lebih mementingkan acara yang benar-benar ingin mencerdaskan masyarakat dengan memberikan informasi pemberitaan secara objektif. Keobjektifan tersebut cenderung lebih condong pada keberpihakannya kepada masyarakat dan penegak hukum untuk memberantas kasus korupsi yang ada di Indonesia. Adanya latar belakang pertarungan politik dalam pilkada 2017 dan pilpres 2019 juga sedikit banyak mempengaruhi wartawan dalam hal mengupas kebobrokan sistem pemerintahan di Indonesia. Namun pengaruh tersebut tidak seekstrem seperti media Metro TV yang lebih gencar mengaitkan kasus korupsi dengan beberapa pihak atau partai tertentu.

### **Aspek Institusional**

Aspek institusional melihat bagaimana pengaruh institusi organisasi dalam proses produksi wacana berita. Institusi ini bisa berasal dari masyarakat, pejabat tinggi negara, ataupun dari pihak media. Artinya institusi tersebut memiliki ideologi yang berperan dalam mengonstruksi wacana berita korupsi tersebut. Dalam hal ini, ideologi dipandang sebagai suatu ide yang diyakini dan sebagai suatu maksud dari pengguna bahasa dapat dikonstruksi dalam bentuk tuturan. Ideologi dipandang sebagai suatu ide dasar yang diyakini pengguna bahasa. Pengaruh institusional sangat terlihat dalam pemberitaan dari media Metro TV. Metro TV sebagai media yang dependen, karena pemilik media ikut andil dalam partai politik dan berafiliasi dengan partai-partai tertentu. Ideologi yang dianut media merupakan ideologi dari pemilik media yang dominan dalam pemroduksian wacana, yaitu ideologi Trilogi Restorasi Indonesia. Oleh karena itu, pemberitaan dari Metro TV mengambil sudut pandang dari upaya untuk mencapai cita-cita mendasar restorasi Indonesia, yaitu Rakyat Sejahtera, Bangsa Bermartabat, dan Negara Kuat. Berdasarkan pendapat dari wartawan Metro mengenai perspektifnya terhadap korupsi, wartawan tersebut memiliki perspektif negatif terhadap kasus korupsi. Namun dari analisis wacana berita korupsi dari Metro TV, wartawan cenderung melakukan penghalusan dalam mengonstruksikan berita korupsi pada



beberapa tokoh yang memiliki kedekatan dengan pemilik atau partai dari pemilik media.

Selain institusi media dan pemerintah Indonesia, ada organisasi politik yang berafiliasi dengan media Metro TV tersebut, berupa partai Nasdem. Secara umum, Metro TV dikecam berbagai pihak, salah satunya KPI karena dianggap memberikan porsi pemberitaan mengenai Partai Nasdem dan koalisinya lebih banyak dibanding partai lain. Pada pemilihan umum Presiden 2014, Metro TV memperoleh kritikan tajam karena memberikan porsi berita lebih banyak kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla ketimbang pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Berdasarkan hal tersebut, institusi media, pemerintahan, dan organisasi politik pemilik media sangat mempengaruhi wartawan dalam mengonstruksi suatu berita korupsi. Selain itu, kepentingan institusi juga terlihat dalam pemberitaan mengenai penjualan aset BUMD yang menjerat Dahlan Iskan seperti dalam data (5) pada penggalan berita berikut.

- (5) Ini bukan pertama kalinya Dahlan tersandung kasus hukum. Pada tahun 2013, Dahlan disebut dalam dakwaan tersangka kasus mobil listrik. Namun pengadilan tindak pidana korupsi menyatakan Dahlan tidak terlibat. Lolos dari kasus mobil listrik, dua tahun kemudian Dahlan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek Pembangunan Gardu Induk PLN oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kasus merugikan negara hingga 1 triliun rupiah. Namun, Dahlan memenangkan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan status tersangkanya digugurkan. Dalam kasus kali ini, apakah Dahlan akan kembali memenangkan praperadilan dan lolos dari jeratan hukum? Tim liputan Metro TV. (*Kasus Hukum Dahlan Iskan*, Metro TV, 29 Oktober 2016)

Dari penggalan di atas dapat dikaitkan dengan sosiohistoris yang terjadi antara Dahlan Iskan dengan Surya Paloh. Ada kepentingan politik yang membuat Dahlan Iskan patut diperhitungkan. Media Jawa Pos Group, miliknya, yang mendukung penuh Jokowi-JK selama pilpres lalu, pengaruhnya cukup besar di Indonesia. Sedangkan media andalan Surya Paloh yaitu Metro TV termasuk media yang relatif tidak semerakyat media Jawa Pos Group. Sementara itu, Dahlan Iskan pernah terlibat dalam debat terbuka melawan Surya Paloh dalam Pertemuan Puncak Pemimpin Redaksi Seluruh Indonesia mengenai “Peran Media dalam

Transfor-masi Politik dan Mendorong Ekonomi Indonesia” pada 2013 lalu (Syaifullah dalam detiknews.com, 2013). Dalam acara itu Dahlan mengaku tidak mau memanfaatkan koran atau media elektroniknya untuk kepentingan politik. Dengan alasan, kalau itu dilakukan, koran dan media elektroniknya tidak akan laku. “Biasanya kalau koran dipakai untuk kepentingan politik, tidak akan laku,” kata Dahlan di depan podium acara yang dihadiri oleh banyak pemimpin redaksi media besar seperti Dirut Emtek Sutanto Hartono, Dirut Kompas Gramedia Agung Adi Prasetyo, dan pendiri Majalah Tempo Fikri Jufri.

Pernyataan Dahlan ditanggapi berapi-api oleh Surya Paloh. “Saya bicara mengenai kebangsaan dan idealisme. Tapi mengapa diprotes? Tapi ada televisi yang menyiarkan sinetron berjam-jam mengapa tidak ada yang protes,” rupanya selain menyindir sahutan Dahlan Iskan, Surya Paloh juga menyerang konsep televisi lain yang juga merupakan rival politik Surya Paloh.

Selain itu, kelemahan Dahlan Iskan adalah dia bukan orang politik dan membangun bisnisnya murni dari kekuatan dan keuletan seorang swasta yang tak mengandalkan proyek negara. Karena bukan orang politik, walaupun terlibat di pemerintahan, kemungkinan Dahlan hanya diajak para penguasa. Hal ini tentu berbeda dengan Surya Paloh yang lekat dengan politik dan hidup dari politik. Sebagai pengusaha dan penguasa politik yang tak jauh-jauh dari kehidupan ekonomi negara, Surya Paloh tentu saja relatif lebih dekat dengan pemimpin negara, termasuk dengan Presiden. Jika sampai Dahlan kembali menarik penguasa negara dalam hal ini presiden dan dimasukkan dalam jajaran kabinet, tentu bisa mengubah keseimbangan dan kekuatan kekuasaan yang dibangun, khususnya pada pilpres tahun 2019 nanti. Hal ini sudah pernah terbukti saat SBY menempatkannya sebagai dirut PLN dan akhirnya jadi menteri BUMN. Karena itulah, Dahlan Iskan dinilai tidak boleh menarik perhatian Presiden Jokowi atau sampai ditarik ke jajaran kabinet. Untuk itulah dia harus disingkirkan dari pusat kekuasaan. Cara yang ditempuh dengan menjadikannya sebagai tersangka kasus korupsi dan dipenjara. Inilah kemungkinan alasan Dahlan Iskan terus “diburu” dengan kasus korupsi.

Di sisi lain, media NET yang merupakan media independen yang pemiliknya tidak berafiliasi dengan partai apapun terlihat berada dalam institusi pemerintah Indonesia, seperti dalam kasus yang sama mengenai penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka pada data penggalan berikut.

- (6) Mantan menteri BUMN ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kamis lalu setelah jalani pemeriksaan marathon sebanyak lima kali. Tim kuasa hukum Dahlan akan ajukan praperadilan terhadap penetapan tersangka oleh Kejati Jawa Timur. (*Dahlan Iskan Kembali Jalani Pemeriksaan*, NET, 31 Oktober 2016)

Gaya pemberitaannya yang vulgar dan terbuka seperti penggalan berita tersebut merepresentasikan bahwa wartawan NET berusaha untuk berdiri objektif sebagai media yang berada dalam institusi pemerintah Indonesia. Sesuai dengan visi yang diusung NET yaitu untuk membangun sebuah perusahaan media yang menarik dan menciptakan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat Indonesia, pihak NET sangat mengecam adanya kasus korupsi yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Hal ini tergambarkan dari pendapat salah satu wartawan NET yang berpendapat bahwa pemberitaan korupsi bagi media NET sendiri tentu sangat menarik karena merupakan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Pemberitaan seperti ini perlu diketahui masyarakat, apalagi jika melibatkan tokoh-tokoh besar, dan atau kerugian negara yang cukup besar. Media NET sendiri memiliki peran ganda, selain menyampaikan informasi, juga untuk membuat efek jera bagi koruptor lain yang belum terlacak. Berdasarkan hal tersebut, institusi media dan keberpihakan kepada pemerintahan yang bersih menjadi faktor yang memengaruhi wartawan dalam mengonstruksi suatu berita korupsi.

### Aspek Sosial

Selain aspek situasional dan institusional, dalam mengonstruksi wacana berita korupsi juga dipengaruhi oleh aspek sosial. Apabila aspek situasional mengarah pada situasi dan suasana yang memengaruhi terbentuknya suatu wacana, aspek institusional memfokuskan pada institusi yang berkaitan dengan

pemberitaan, maka aspek sosial lebih melihat pada aspek makro di dalam masyarakat secara menyeluruh, seperti sistem politik, ekonomi, maupun sistem sosial masyarakat.

Adanya konteks sosial yang melingkupi pemberitaan korupsi tersebut menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan. Konteks sosial secara umum yang terjadi saat itu adanya fenomena munculnya tokoh-tokoh penting atau pelaku korupsi yang selama ini tidak “tersentuh” hukum lambat laun mulai muncul dan diselidiki oleh para penegak hukum. Konteks sosial yang berkembang saat itu adalah adanya hasil kerja tiga institusi penegak hukum dalam hal memberantas kasus korupsi, yakni KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan yang dirangkum dalam penelitian yang dirilis oleh ICW. Selain itu, disahkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar juga melatarbelakangi meningkatnya pemberitaan kasus korupsi yang ada di Indonesia.

Apabila dilihat dari konteks ekonomi, pemberitaan di Metro TV jauh terlihat lebih berusaha mendongkrak *share* dan *rating* untuk meningkatkan pemasukan iklan. Hal ini sesuai dengan visi yang diusung oleh media Metro TV, yaitu “untuk menjadi sebuah stasiun televisi yang Indonesia berbeda dengan peringkat nomor satu untuk beritanya, menawarkan kualitas dan program hiburan gaya hidup. Memberikan kesempatan periklanan unik dan mencapai kesetiaan dengan pemirsa dan pengiklan”. Redaksi pemberitaan kerap dihadapkan pada usaha untuk melakukan berbagai cara yang terkadang esensi berita televisi yang seyogianya memberi informasi kepada masyarakat pada akhirnya berubah menjadi sedikit “menghibur” atau promosi. Sementara itu, NET TV menghadirkan berbagai gebrakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia yang menginginkan tayangan berkualitas, mendidik, dan menghibur. Salah satu strategi yang diterapkan NET TV adalah menerapkan kebijakan iklan yang lama penayangannya hanya tiga menit. NET percaya hal ini akan berdampak positif bagi pengiklan dan penonton. “Dengan kebijakan iklan hanya tiga menit, iklan akan lebih ditonton dibandingkan iklan yang lamanya tujuh menit. Jadi, jangan hanya melihat CPRP (*Cost per Rating Point*),” ujar Wishnutama Kusubandio, CEO Netmedia dalam

*Marketeers.com*. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa konteks ekonomi tidak akan bisa lepas dari kehidupan suatu media massa di televisi. Bahkan dalam siaran berita, terkadang produser memasukkan iklan di sela-sela pemberitaan atau memasang iklan yang dikemas dalam berita untuk meningkatkan *rating* dan pendapatan.

Kondisi ekonomi di Indonesia yang masih memprihatinkan dibandingkan dengan negara-negara lain juga menjadi alasan mengapa pemberitaan korupsi di Indonesia gencar diberitakan dan diusut kasusnya. Sebagai media publik, baik Metro TV dan NET sudah pasti akan memberitakan kasus yang merugikan perekonomian negara dengan cara memberitakan kasus korupsi tersebut.

Apabila aspek sosial dilihat dari konteks politik, maraknya pemberitaan kasus korupsi tersebut muncul pada saat menjelang pilkada Jakarta, sehingga adanya persaingan dukungan dari berbagai partai yang mengusung kandidat masing-masing. Begitu pula pada media Metro TV yang digawangi oleh aktor politik partai Nasdem. Melihat situasi tersebut, media Metro TV akan melakukan berbagai manuver untuk menjatuhkan lawan politiknya baik dalam pilkada DKI 2017 ataupun pilpres Indonesia yang akan dilaksanakan tahun 2019. Hal ini merupakan kesempatan emas untuk membongkar kebobrokan dari partai-partai lawan dan menunjukkan kelebihan dari partai Nasdem dan koalisinya. Dalam hal ini, media Metro TV berusaha keras untuk membentuk citra positif dan negatif di setiap pemberitaannya. Sementara itu, pemberitaan yang diproduksi oleh media NET terlihat hanya sekadar memberitakan kasus korupsi yang ada di Indonesia. Di sisi ini, media NET terlihat lebih memilih mengambil keuntungan dari pemberitaan mengenai kasus korupsi di Indonesia.

Munculnya beberapa konteks sosial tersebut menjadikan masyarakat mulai antusias dan mulai mempercayai lembaga penegak hukum dalam memberantas kasus-kasus korupsi yang selama ini terkesan disembunyikan. Menurut wartawan Metro TV, Siti Fazilah Khairunnisa, bahwa sejauh ini, dengan adanya KPK dan operasi tangkap tangannya, kinerja pemberantas korupsi di Indonesia sudah cukup berani dan berkembang. Hanya tinggal bagaimana KPK benar-benar berani untuk

mengungkap semua kasus korupsi yang ada di Indonesia dengan dibantu lembaga kepolisian. Hampir senada dengan Fazilah, Dede Rohali yang merupakan wartawan dari NET juga berpendapat bahwa kinerja pemerintahan dalam mengatasi permasalahan korupsi memang perlu diapresiasi. Meskipun belum berdampak signifikan dalam pencegahan, tetapi KPK atau polri sudah menunjukkan usahanya untuk memberantas koruptor hingga akarnya. Sayangnya, beberapa penegak hukum yang memiliki wewenang tersebut masih terlihat tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi. Seperti adanya kasus kriminalisasi pimpinan KPK ketika KPK mulai mencium korupsi yang dilakukan oleh petinggi Polri ataupun keluarga kepresidenan. Namun, secara keseluruhan lembaga-lembaga penegak hukum saat ini sudah menunjukkan pola kerja yang lebih baik dari sebelumnya.

## **SIMPULAN**

Praktik sosiokultural dari konstruksi berita korupsi di Metro TV dan NET dipengaruhi oleh aspek situasional, institusional, dan sosial. Dengan aspek-aspek tersebut, diketahui latar belakang media dalam mengonstruksikan suatu berita korupsi cenderung mengarah pada suatu maksud tertentu. Berikut uraian yang melatarbelakangi media Metro TV dan NET dalam memproduksi wacana berita korupsi yang terdiri atas tiga aspek, yaitu aspek situasional, aspek institusional, dan aspek sosial. Aspek situasional, yaitu wacana berita dipengaruhi keadaan politik di mana pada awal tahun 2017 akan dilangsungkan pilkada DKI Jakarta dan para pemilik media menggunakan kekuasaan mereka untuk menentukan bingkai berita dan posisi dukungannya terhadap tokoh-tokoh tertentu. Selain itu, adanya pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Oktober 2016. Aspek institusional, yaitu adanya pertarungan wacana antara penguasa media, KPK, dan institusi yang terlibat kasus korupsi, dan aspek sosial, yaitu adanya konteks ekonomi, politik, dan sosial masyarakat yang berujung pada

antusiasme masyarakat yang mulai mempercayai lembaga penegak hukum dalam memberantas kasus-kasus korupsi yang selama ini masih tersembunyi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Assidik, Gallant Karunia, B. Wahyudi Joko Santoso, dan Fathur Rokhman. 2016. "Citra Publik Presiden Republik Indonesia pada Pemberitaan di Harian Suara Merdeka, Tabloid Tempo, dan Harian Republika: Kajian Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough". *Jurnal Seloka*. Vol.5, No. 2. Semarang: Unnes. Hlm. 201-215.
- Burton, Graeme. 2008. *Yang Tersembunyi di Balik Media: Pengantar kepada Kajian Media*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Wacana Kritis: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS Group.
- Fairclough, Norman. 1992. "Discourse and Text: Linguistic and Intertextual Analysis Within Discourse Analysis". *Sage Journal* Vol. 3(2). 193-217. London, New Bury Park, and Delhi.
- Fairclough, Norman dan Ruth Wodak. 1997. "Critical Discourse Analysis: An Overview". Dalam: *Teun van Dijk (Ed.). Discourse and Interaction*. London: Sage Publication pg.67-97.
- Mardikantoro, Hari Bakti. 2014. "Analisis Wacana Kritis pada Tajuk (Anti) Korupsi di Surat Kabar Berbahasa Indonesia". *Jurnal Litera* Vol. 13, Nomor 2. Yogyakarta: FBS UNY.
- Marketeers Editor. 2015. "Iklan Tiga Menit, Bukan Berarti NET TV Tidak Laku". Artikel di Marketeers.com yang dimuat pada 1 Mei 2015.
- Peter Berger, L dan Lukman Thomas. 1990. *The Social Construction of Reality. A Treatise in The Sociology of Knowledge*, terj. Hasan Basari, Hasan, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES. hlm. 13.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Syaifullah, Asep (Asy). 2013. "Diskusi Memanas, Dahlan Iskan Salami Surya Paloh". Artikel Berita di *detiknews.com*. Dimuat pada Kamis, 13 Juni 2013, 11:49 WIB.
- Tabrani, Primadi. 1992. *Semiotika dan Bahasa Rupa Gambar*. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya LPUI dan Lingkaran Peminat Semiotika.

Titscher, S. M. Meyer, R. Wodak, dan E. Vetter. 2000. *Methods of Text and Discourse Analysis*. London: Sage Publications.